

**ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARTAKAT LOKAL KABUPATEN MERAUKE**

Syahrudin Syahrudin  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Musamus  
[syahrudin@unmus.ac.id](mailto:syahrudin@unmus.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat perlu menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama masyarakat lokal yang tinggal di kampung-kampung yang jauh di pelosok kampung, peningkatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan, melalui sosial budaya, kebijakan pemerintah, dan Kapasitas sumberdaya manusia. Tujuan artikel ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah, Kapasitas sumberdaya manusia terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di kabupaten merauke, dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menggambarkan bahwa program pemerintah sangat pengeruh positif dan signifikan, dengan berbagai kebijakan program ke kampung-kampung dengan berbagai kegiatan dan bantuan dana ke kampung. Sedangkan Kapasitas sumberdaya masyarakat pengaruh tidak signifikan, masih banyak masyarakat kampung lokal masih kurang tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang masih tinggi serta sosial budaya yang masih kuat.

*Kata kunci : Kapasitas SDM; Program Kebijakan Pemerintah; Masyarakat Lokal*

**ABSTRACT**

Community empowerment needs to be the main priority of the central government and regional governments, especially local people who live in villages far from remote villages, increasing community empowerment will improve welfare and sustainable development, through social culture, government policies, and human resource capacity. The purpose of this article is how the influence of government policy, human resource capacity on the empowerment of local communities in Merauke Regency, using the method of multiple regression analysis. The results of the study illustrate that the government program is very positive and significant, with a variety of program policies to the villages with various activities and financial assistance to the village. While the influence of community resource capacity is insignificant, there are still many local village communities that still lack education levels and health levels that are still high and socio-cultural which are still strong.

Keywords: HR Capacity; Government Policy Programs; Local Communities

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah telah melakukan berbagai macam program kebijakan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Program kebijakan Pemerintah mulai dari Desa atau kampung telah dilakukan dengan memberi dana yang cukup besar. Dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia di Indonesia terasa amat kurang lebih-lebih di daerah pedesaan atau di kampung-kampung. Peraturan Presiden dikatakan daerah tertinggal adalah daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang maju dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Peraturan Presiden Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, di Papua ada 25 kabupaten yang tergolong salah satunya Kabupaten Merauke.

Program kebijakan pemerintah telah di rasakan di wilayah papua paling ujung timur Indonesia, yaitu wilayah kabupaten Merauke di mana dengan letak giografi yang cukup sulit di jangkau. Kebijakan pemerintah daerah melalui program misinya adalah peningkatan kualita sumber daya manusia sesuai pengembangan potensi daerah. Program pemerintah sejak tahun 2012 hingga sekarang telah ada melalui APBD maupun APBN seperti program pembangunan kampung, PNPM mandiri, Gerbangku, pengembangan pertanian, dana desa dan dana kampung. (Cumming, Hennink dkk) Kemandirian masyarakat kampung menjadi fokus Pemerintah Daerah yaitu membentuk masyarakat yang berkompetisi meningkatkan kesejahteraan dimana dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat bersinerji dalam bidang ketahanan pangan, mutu sumber daya manusia, dan kualitas hidup masyarakat. (Ellitan, Korczynski).

Pembangunan di kabupaten merauke ternyata belum merata ke semua kampung, masih banyak kampung yang hingga kini belum sepenuhnya tersentuh tangan pemerintah, semestinta diarahkan kekampung-kampung yang jauh di pelosok pedelaman. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan tetapi masih ada sejumlah kampung lokal yang dihuni penduduknya asli, kondisi kampungnya masih tetap sama seperti dulu bahkan bertambah parah karena kurang pengawasan dan perhatian.(Minniti, Noor).

## **METODE PENELITIAN**

Data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Populasi penelitian adalah desa atau kampung-kampung lokal yang ada di Kabupaten Merauke.

Teknik penelitian adalah teknik pengambilan sampel berupa non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Besaran sampel digunakan penelitian ini adalah 30 responden. Penelitian dalam penyusunan kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert akan dipergunakan berskor 1 sampai 5.

Fokus Penelitian yaitu:

- a) Variabel Kebijakan Pemerintah diukur dengan menggunakan indikator program Dana Desa, Program Dana Kampung, dan Pendampingan Program
- b) Variabel Kapasitas Sumberdaya Manusia diukur dengan menggunakan indikator Pendidikan, Kesehatan, pelatihan
- c) Variabel Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan menggunakan indikator partisipasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat

Analisis Data

Uji Validitas bisa valid ketika r hitung besar dari rtabel. Uji validitas melalui program SPSS 22 for windows. Pengukuran dengan teknik Cronbach Alpha antara 0-1. dan bertujuan untuk melihat dua variabel diman mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.

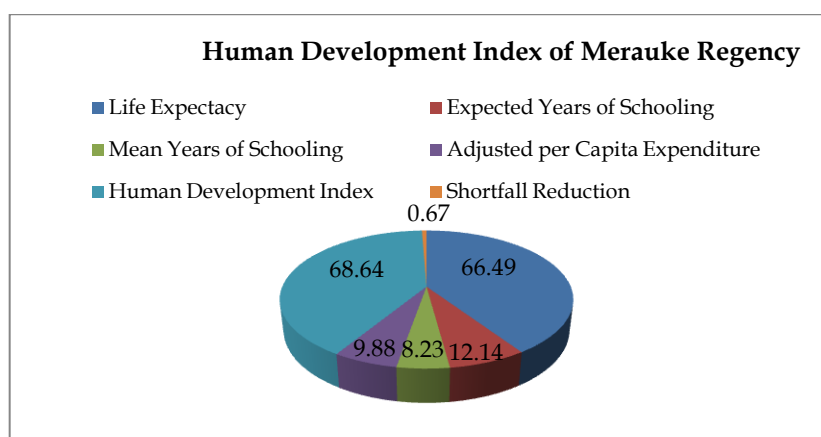
Data di proses dengan Analisis Korelasi Berganda. Hipotesis Penelitian adalah Kebijakan pemerintah, berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran umum program pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dengan mempunyai luas 14,22% luas Propinsi Papua terbagi menjadi 20 Distrik, 11 Kelurahan dan 179 Kampung. Sensus BPS PAPUA tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk asli papua dimerauke sebanyak 72.554 jiwa dan non-papua sebanyak 122.130 jiwa. Tentunya penambahan penduduk semakain meningkat dimana tahun 2018 dengan jumlah penduduk sebesar 223.389 jiwa tersebar di 20 Distrik. Penduduk dalam suatu

daerah merupakan sumber daya manusia yang diinginkan dalam sistem pengembangan dan pembangunan di segala sektor yang mampu mengelola sumberdaya alam.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Merauke terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Merauke adalah 68,64. Angka ini meningkat 0,55 poin dibandingkan tahun 2016 (Astri, Badan Pusat Statistik Kabupateb Merauke).



Sumber : data BPS Kabupaten Merauke

Gambar 1. Human development Index of merauke Regency

Ditingkat kesehatan pada tahun 2017, tercatat sebanyak 337 fasilitas kesehatan yang tersebar di setiap kecamatan di kabupaten merauke. Ada sekitar 1187 tenaga kesehatan di seluruh kabupaten merauke. Penyakit terbanyak yang menyerang di kabupaten merauke yaitu infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas yaitu sebanyak 57.179.

Tabel 1. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Merauke, 2017

Nomor	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas	57 179
2	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (Penyakit tulang belulang, radang sendi termasuk reumatik)	24 808
3	Gastritis	14 332
4	Penyakit tekanan darah tinggi	10 400
5	Diare	8 600
6	Kecelakaan dan ruda paksa	8 907
7	Penyakit kulit infeksi	6 924
8	Penyakit kulit karena alergi	6 728
9	Asma	6 653
10	Penyakit lain saluran bagian atas	5 956
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>150 487</b>

Sumber. Data Merauke dalam angka 2018

Tabel 2. Hasil Olahan Uji Variabel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,940	4,979		3,402	,002
Kebijakan Pemerintah	,626	,077	,854	8,140	,000
Kapasitas SDM	,076	,134	,060	,570	,574
R. = 0,845				Sig. F hitung = 0.00	
R Square = 0,713					
Adjusted R Square = 0,692					

Hasil uji tabel diatas dapat di formulasikan dalam regresi berganda yaitu:

$$Y = 16,940 + 0,626 X_1 + 0,076X_2$$

Besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,845 mendekati nilai 1 maka hubungan ketiga variabel kebijakan pemerintah, Kapasitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nilai koefien korelasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,713 ini berarti bahwa pemberdayaan masrakat sangat di pengaruhi sebesar 71,3% oleh faktor kebijakan pemerintah dan Kapasitas sumberdaya manusia dan 28,7% di pengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang tidak dapat disebutkan.

1. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap pemebrdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan yaitu 0,626 dengan tingkat signifikansi yaitu 0.000. ini menunjukkan indikator-indikator terhadap kebijakan pemerintah melalui program pelatihan, kebijakan bantuan dana desa, dana kampung dan program Gerbangku akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung. (Minniti)

Program kebijakan pemberdayaan masyarakat kampung oleh pemerintah pusat maupun daerah belum begitu tampak perubahan secara signifikan di kabupaten merauke, terutama pada kampung-kampung masyarakat lokal untuk itu perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam memajukan sehingga dapat mengangkat kehidup masyarakat yang lebih baik. Tentunya fungsi dan peran serta perintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat di kampun-kampung. (Noor)

Kebijakan pemerintah tentang bantuan dana di berbagai kampung hendaknya dilakukan pendampingan dan monitoring yang lebih optimal guna memastikan penggunaan dana kampung dan pelatihan yang tepat bagi masyarakat karena bentuk pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung sangat berbeda potensi alamnya dan kultur budayanya.

2. Pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap pemberdayaan masyarakat  
Hasil pengujian menunjukkan Kualitas sumber daya manusia terhadap pemberdayaan masyarakat perpengaruh positif sebesar 0,076 dengan tidak signifikan sebesar 0,574. Hal ini menunjukkan kualitas di Kabupaten Merauke belum optimal atau masih perlu ditingkatkan. perhatian terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia menjadi fokus utama Kepala Daerah mulai dari pendidikan, kesehatan, pelatihan dan pemberdayaan. Kapasitas sumberdaya manusia terutama masyarakat lokal yang hidup di kampung-kampung yang jauh dari kota kabupaten merauke salah satu faktor yang perlu diperhatikan pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi di kampung-kampung. Kapasitas sumberdaya manusia di kabupaten merauke menjadi prioritas utama terutama melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam tingkat kesehatan yang lebih baik karena jumlah masyarakat yang sakit sebanyak di tahun 2018 sebesar 150.487 jiwa.

### **Kesimpulan**

Kebijakan pemerintah dan Kapasitas sumberdaya manusia sangat perpengaruh positif sebesar 16.940 dan tingkat signifikan sebesar 0.002 terhadap pemberdayaan masyarakat di kabupaten merauke . Kebijakan pemerintah sangat perpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di kabupaten merauke di lihat dari ttabel (1.7033) pada tingkat signifikan 5%, Kualitas sumberdaya manusia memiliki positif tidak signifikan sumberdaya manusia. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi program kebijakan pemerintah sangat tinggi di tingkat kampung, namun tingkat kesejahteraan masyarakat masih belum optimal hal ini diakibatkan daerah yang potensial alam dan budaya masyarakatnya masih kuat.

### Daftar Pustaka

- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102.
- Badan Pusat Statistik 2018 Merauke dalam angka Kabupaten Merauke
- Cumming, D. (2007). Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds. *Journal of Business Venturing*, 22(2), 193-235.
- Fernandez-Alles, Mariluz, and Antonio Ramos-Rodríguez. "Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal *Human Resource Management*, 1985-2005." *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 60.1 (2009): 161-175.
- Ellitan, L. (2004). Praktik-Praktik Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 65-76.
- Korczynski M. *Human resource management in the service sector*. Basingstoke: Palgrave; 2002.
- Hennink, M., Kiiti, N., Pillinger, M., & Jayakaran, R. (2012). Defining empowerment: perspectives from international development organisations. *Development in Practice*, 22(2), 202-215.
- Minniti, Maria. "The role of government policy on entrepreneurial activity: productive, unproductive, or destructive?." *Entrepreneurship Theory and Practice* 32.5 (2008): 779-790.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2/Juli).
- Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-27.